

LANDASAN HUKUM DAN FONDASI TATANEGARAAN YANG KUAT

Dio Rabbani Achmad, Rafli Mohamad Yudiansyah, Siti Maisya Mufidah, Vika Oktivanny
Universitas Siliwangi, Indonesia

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang konstitusi sebagai peraturan atau hukum tertinggi yang mengatur pembentukan, keberadaan, dan tata cara kerja suatu negara atau lembaga. Konstitusi memiliki fungsi penting dalam menyusun tata negara, melindungi hak dan kewajiban warga negara, menjamin keamanan dan ketertiban, mengatur hubungan antarlembaga negara, dan memiliki mekanisme perubahan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sejarah konstitusi bermula sejak zaman kuno dan konstitusi modern muncul dengan pengaruh pencerahan di Eropa. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku hingga saat ini. Konstitusi memainkan peran penting dalam demokrasi dengan melindungi hak-hak warga negara, memastikan pemilihan yang adil, bertanggung jawabnya pemerintah kepada rakyat, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan memiliki konstitusi yang kuat, suatu negara dapat menjaga stabilitas politik, mempromosikan keadilan sosial, dan mewujudkan tata negara yang demokratis.

Kata Kunci: Tata Negara, Pembentukan Negara, Konstitusi Modern.

Abstract:

This article discusses the constitution as the highest regulation or law that regulates the formation, existence, and working procedures of a country or institution. The constitution has an important function in drafting state governance, protecting the rights and obligations of citizens, ensuring security and order, regulating relations between state institutions, and having a change mechanism in accordance with the development of society. The history of constitutions dates back to ancient times and modern constitutions emerged with the influence of the Enlightenment in Europe. In Indonesia, the 1945 Constitution became the first constitution to date. The constitution plays an important role in democracy by protecting the rights of citizens, ensuring fair elections, holding the government accountable to the people, and providing protection against discrimination. By having a strong constitution, a country can maintain political stability, promote social justice, and realize democratic statecraft.

Keywords: statecraft, state formation, modern constitution.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan landasan hukum yang fundamental bagi suatu negara. Fungsi-fungsi penting dari konstitusi meliputi menyusun tata negara, perlindungan hak dan kewajiban warga negara, menjaga keamanan dan ketertiban, mengatur hubungan antarlembaga negara, serta menyediakan mekanisme perubahan konstitusi. Selain itu, sejarah konstitusi telah melalui perkembangan dari zaman kuno hingga masa modern, mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, konstitusi memegang peranan kunci dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Melalui konstitusi, hak-hak warga negara dilindungi, batasan-batasan kekuasaan pemerintah ditetapkan, dan mekanisme partisipasi politik disediakan. Konstitusi juga menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat, serta mengatur proses pemilihan umum yang adil dan transparan. Selain itu, konstitusi memastikan akuntabilitas pemerintah dan perlindungan terhadap diskriminasi serta penindasan. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi itu satu kondisi yang diperlukan untuk pendirian konstruksi negara merdeka, oleh karena itu pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi adalah sebuah dokumen yang menjadi landasan hukum dan fondasi dalam menyusun tata negara suatu bangsa. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembentukan, keberadaan, serta tata cara kerja pemerintahan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang konstitusi, peran serta fungsi pentingnya dalam mengatur kehidupan negara, serta peran aktif yang dimainkan dalam melindungi hak-hak warga negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, kajian ini bersifat deskriptif analitik, hal ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem lembaga keuangan syariah dengan sistem Lembaga keuangan konvensional. Tulisan ini akan menawarkan tentang perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* yang berarti membentuk. Istilah ini mengacu pada pembentukan suatu negara. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Secara praktis, konstitusi dapat memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, meskipun ada juga yang menganggapnya setara dengan Undang-Undang Dasar (Dahlan Thaib, 2008: 7). Dalam bahasa Latin, kata konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu *cume* yang berarti bersama dengan dan *statuere* yang berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Berdasarkan itu, kata *statuere* memiliki arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan (Dahlan Thaib, 2008: 7). Secara terminologi, konstitusi adalah sebuah istilah yang tidak hanya memiliki makna yang sederhana, tetapi juga dapat memiliki makna yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah yang ada dalam suatu negara.

Pendekatan untuk memahami konstitusi tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, terutama Hukum Tata Negara, tetapi juga harus dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian konstitusi memiliki muatan politik yang lebih kuat daripada muatan yuridis. Konstitusi dapat didefinisikan sebagai peraturan atau hukum tertinggi yang mengatur pembentukan, keberadaan, dan tata cara kerja suatu negara atau lembaga. Konstitusi mencakup seperangkat aturan dan prinsip dasar yang menentukan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara.

2. Fungsi Konstitusi

a. Menyusun Tata Negara

Konstitusi berperan penting dalam menyusun tata negara. Melalui konstitusi, struktur pemerintahan ditetapkan, kekuasaan dipisahkan, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara diatur. Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan prinsip dasar dalam konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

b. Perlindungan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Konstitusi melindungi hak-hak asasi warga negara, seperti kebebasan beragama, berpendapat, berkumpul, dan hak atas keadilan. Konstitusi juga menetapkan kewajiban-kewajiban warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, menghormati hukum, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Melalui konstitusi, hak-hak dan kewajiban warga negara ditegaskan dan dijamin.

c. Menjamin Keamanan dan Ketertiban

Konstitusi berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menetapkan aturan hukum yang berlaku. Konstitusi juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi kepentingan dan keamanan negara serta warganya. Melalui konstitusi, negara dapat melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal.

d. Pengaturan Hubungan Antarlembaga Negara

Konstitusi mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, termasuk hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga serta mekanisme kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam konstitusi, tercipta keseimbangan kekuasaan dan kerjasama yang efektif antarlembaga negara.

e. Mekanisme Perubahan Konstitusi

Konstitusi juga harus memiliki mekanisme perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hal ini memungkinkan konstitusi dapat diubah atau direvisi apabila terdapat kebutuhan yang mendesak atau perubahan sosial yang signifikan. Proses perubahan konstitusi biasanya melibatkan konsensus dan partisipasi aktif dari masyarakat.

3. Sejarah Konstitusi

Konsep konstitusi telah ada sejak zaman kuno, meskipun bentuk dan isi konstitusi berbeda-beda dari waktu ke waktu. Salah satu konstitusi tertua yang masih dikenal adalah Konstitusi Athena pada abad ke-5 SM, yang menetapkan sistem pemerintahan demokrasi di kota negara Athena. Seiring berjalannya waktu, konstitusi-konstitusi modern mulai muncul dengan pengaruh pencerahan di Eropa pada abad ke-18. Konstitusi Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 menjadi salah satu konstitusi modern pertama yang memberikan inspirasi bagi konstitusi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konstitusi pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini dengan beberapa amendemen yang dilakukan untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahun 2000, sejumlah negara di dunia mengalami perubahan konstitusi sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi. Konstitusi yang disusun pada tahun tersebut mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Salah satu contoh konstitusi yang disusun pada tahun 2000 adalah Konstitusi Republik X. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam tata negara, seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan hak untuk memilih. Konstitusi Republik X juga mengatur struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Konstitusi Republik X juga memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu lingkungan hidup, keberlanjutan, dan perlindungan sumber daya alam. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan alam bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, konstitusi tahun 2000 juga sering kali mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Konstitusi tersebut menyediakan dasar hukum untuk melindungi privasi individu, kebebasan berekspresi di dunia maya, serta pengaturan terkait kejahatan komputer dan perlindungan data pribadi.

4. Peran Konstitusi dalam Demokrasi

Konstitusi memainkan peran kunci dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Dalam demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak warga negara, menetapkan batasan-batasan kekuasaan pemerintah, serta memberikan mekanisme partisipasi politik kepada rakyat.

Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan landasan penting dalam demokrasi. Melalui konstitusi, warga negara memiliki hak untuk mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Konstitusi juga menetapkan aturan-aturan yang mengatur pemilihan umum dan proses politik lainnya. Konstitusi memastikan adanya pemilihan yang adil, bebas, dan transparan, serta memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Konstitusi juga menyediakan mekanisme perubahan dan penggantian pemerintah yang damai dan demokratis. Selain itu, konstitusi berperan dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pemerintahan yang baik sebagai standar bagi pemerintah. Warga negara dapat menggunakan konstitusi sebagai

dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak mereka. Konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dan penindasan. Konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia yang merata bagi semua warga negara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Konstitusi melindungi minoritas dan kelompok rentan dari perlakuan yang tidak adil atau penindasan oleh mayoritas. Melalui konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebebasan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga tata negara yang demokratis, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

Konstitusi merupakan landasan hukum dan fondasi dalam menyusun tata negara suatu bangsa. Konstitusi mengatur struktur pemerintahan, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Melalui konstitusi, hak-hak dan kewajiban warga negara ditegaskan dan dijamin, keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, dan keadilan dapat diwujudkan. Konstitusi juga memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Konstitusi melindungi kebebasan berpendapat, memberikan mekanisme partisipasi politik kepada rakyat, serta memastikan pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara. Konstitusi juga melindungi minoritas dan kelompok rentan dari diskriminasi dan penindasan. Dengan memiliki konstitusi yang kuat, relevan, dan melindungi hak-hak warga negara, suatu negara dapat menjaga stabilitas politik, mempromosikan keadilan sosial, dan mewujudkan tata negara yang demokratis. Konstitusi adalah tonggak utama dalam membangun masyarakat yang adil, bebas, dan berdaulat.

BIBLIOGRAFI

Fransiska Viola Gina. 2022. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa Orde Lama Hingga Reformasi

[https://bobo-grid-id.cdn.ampproject.org/v/s/bobo.grid.id/amp/083489454/sejarah-dan-](https://bobo-grid-id.cdn.ampproject.org/v/s/bobo.grid.id/amp/083489454/sejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di-)

[perkembangan-demokrasi-di-](https://bobo-grid-id.cdn.ampproject.org/v/s/bobo.grid.id/amp/083489454/sejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di-) Rafi Aufa Mawardi. 2022. Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa/amp>. Diakses pada 28 Mei 2023

Dhani Kurniawan. 2016. Demokrasi indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-reformasi?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16852938156428&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fbobo.grid.id%2Fread%2F083489454%2Fsejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di-indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-reformasi. Diakses pada 28 Mei 2023

Gama Prabowo. 2020. Demokrasi Indonesia masa Demorasi Pancasila (1966-1998)

<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/10/22/130156569/demokrasi-indonesia-masa-demorasi-pancasila-1966-1998>. Diakses pada 28 Mei 2023

Yuda Prinada. 2022. Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia

https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/sejarah-masa-demokrasi-parlementer-atau-liberal-di-indonesia-gbDP?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16852941610596&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fsejarah-masa-demokrasi-parlementer-atau-liberal-di-indonesia-gbDP. Diakses pada 28 Mei 2023

Nana Setialaksana dan Randy Fadillah Gustaman. 2018. Teori-Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Tasikmalaya: Galuh Nurani Publishing House

Copyright holder:

Dio Rabbani Achmad, Rafli Mohamad Yudiansyah, Siti Maisya Mufidah, Vika Oktivanny (2023)

First publication right:

[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:

